

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Krisis finansial yang pernah melanda Kawasan Asia di era 1970 hingga 1980 terulang kembali di tahun 1997 yang kemudian berdampak kepada kondisi perekonomian Indonesia. Ketidakmampuan menghadapi krisis menjadikan Indonesia harus menerima bantuan IMF. Dikutip dari Indonesia Investments.com, menyatakan Indonesia mengalami masa-masa pelik di tahun 1997, dimana terjadinya krisis moneter yang tak hanya berdampak pada kegiatan ekonomi namun juga kepada sistem politik dan sosial yang ada di Indonesia. IMF menawarkan paket reformasi untuk menanggulangi krisis yang ada di Indonesia dengan memberikan paket boilot sebesar USD \$43 milyar agar masyarakat kembali percaya dengan pemerintahan Indonesia. Dengan diberikannya paket boilot ini kepada Indonesia IMF meminta agar dibuatnya langkah reformasi mendasar, antara lain : Penutupan 16 bank swasta, penurunan subsidi pangan dan energi serta menaikkan iklim suku bunga.

Bermula dari krisis moneter yang kemudian berubah menjadi krisis keuangan dan krisis perbankan. Banyak bank-bank yang akhirnya tak sanggup bertahan menghadapi krisis perbankan yang ada. Seperti kutipan berita diatas selain tak sanggup dengan bergejolaknya nilai rupiah, IMF pun meminta pemerintah Indonesia untuk menutup 16 bank swasta.

Hingga memasuki 1998 krisis tak kunjung reda bahkan semakin menjadi-jadi. Namun pemerintah membuat kebijakan untuk menangani kondisi perbankan yang kian melemah. Dupla Kartini dalam liputan khusus perbankan memperkuat pendapat tersebut Pemerintah Indonesia mendirikan sebuah badan nasional dalam rangka menanggulangi masalah perbankan Indonesia yang disebabkan oleh krisis moneter yakni Badan Penyelesaian Perbankan Nasional (BPPN). BPPN memiliki tugas menyelesaikan aset bermasalah dan mengusahakan kembalinya uang negara yang telah tersalur di perbankan. Bank Indonesia mencatat sebanyak 38 bank mengalami saldo debit. Sebelum didirikannya BPPN, pemerintah sudah terlebih dahulu mengumumkan bahwa tidak akan ada lagi penutupan bank. Dan menjamin pembayaran semua kewajiban perbankan berbadan hukum Indonesia (Kartini, 2016).

Dalam beberapa tahun terakhir setelah munculnya krisis moneter perhatian pemerintah terhadap kebijakan dan peraturan perbankan semakin diperbesar. Sektor perbankan di Indonesia tercatat mengalami kenaikan yang signifikan. Jumlah bank semakin lama semakin meningkat. Ditandai dengan kemunculan bank-bank didaerah baik bank umum ataupun bank syariah. Sejalan dengan hal tersebut, kebutuhan akan keberadaan bank syariah menginisiasi berdirinya Bank Muamalat sebagai bank pertama yang beroperasi mengikuti prinsip Syariah pada tahun 1991. Perkembangan keuangan syariah telah membuahkan berbagai prestasi, dari makin banyaknya produk dan layanan, hingga berkembangnya infrastruktur yang

mendukung keuangan syariah. Bahkan di pasar global, Indonesia termasuk dalam sepuluh besar negara yang memiliki indeks keuangan syariah terbesar di dunia (Firmansyah, 2017). Namun demikian, pertumbuhan keuangan syariah belum dapat mengimbangi pertumbuhan keuangan konvensional. Selama masa eksistensinya masih terdapat masalah mendasar yang dimiliki Bank syariah yakni pangsa pasar atau dikenal dengan *market share*. OJK menyebutkan dalam *Road Map* Perbankan Syariah tahun 2017-2019 bahwa rendahnya *market share* perbankan syariah dikarenakan lemahnya daya saing dengan perbankan konvensional. Rendahnya *market share* perbankan syariah sama dengan rendahnya minat masyarakat terhadap bank syariah. Bank syariah di Indonesia dinilai lambat dalam mengembangkan usahanya. Tidak efisiennya penggunaan dana bank syariah yang masih terpusat di pembiayaan dana mahal serta kurang kreatifnya dan variatifnya produk yang dikeluarkan oleh bank syariah. Namun ada aspek penting yang menyebabkan bank syariah mendapati *market share* yang relatif kecil, yakni kurang sadarnya masyarakat Indonesia dan belum pemahannya tentang konsep perbankan syariah”. (Zuraya, 2018)

Dari berita diatas dapat disimpulkan bahwa minat masyarakat terhadap bank syariah yang masih minim dikarenakan kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat akan bank syariah. Serta jika dibandingkan dengan bank konvensional, bank syariah masih belum banyak memiliki produk yang dapat menarik minat masyarakat. Keterbatasan dalam pilihan investasi dan akses yang terbatas pada transaksi pada jenis transaksi antar bank yang

bebas bunga masih menjadi tantangan bagi bank syariah. Bank syariah masih harus menjaga tingkat pengembalian tetap menguntungkan bagi investor. Namun tetap memperhitungkan kemungkinan terjadinya rugi dari pembiayaan yang disalurkan. Informasi atas laba menjadi sesuatu yang penting untuk memperhitungan pembagian keuntungan pada kontrak bagi hasil.

Menurut (Solihin, 2017) dalam kaitan dengan pengelolaan perbankan syariah ASEAN di masa mendatang, permasalahan kemungkinan muncul saat persaingan pasar perbankan menguat, dan Bank Umum Syariah tetap tidak mampu beroperasi secara efisien sehingga tidak mampu berkompetisi dan pada akhirnya bisa gagal bertahan. Laporan keuangan merupakan alat untuk menyampaikan informasi keuangan sebuah perusahaan. Tujuan laporan keuangan secara khusus adalah menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja dan perubahan di dalam posisi keuangan lainnya sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Informasi laba/rugi yang ada di dalam laporan keuangan digunakan pengguna untuk pengambilan keputusan yang tepat dengan kata lain ketepatan pengguna dalam mengambil keputusan ditentukan dengan kualitas informasi laporan keuangan. Menurut penjelasan Braam dan Van Beest untuk menilai kualitas laporan keuangan dapat dilihat dari kualitas laba. Kualitas laba yang lebih tinggi memberikan informasi lebih tentang gambaran kinerja keuangan perusahaan yang relevan dengan keputusan yang dibuat oleh pemakai tertentu (Mubarak, 2017).

Pentingnya informasi laba secara tegas telah disebutkan dalam *Statement of Financial Accounting Concept (SFAC) No. 1* yang menyatakan bahwa selain untuk menilai kinerja manajemen, laba juga membantu mengestimasi kemampuan laba yang *representative* dan menaksir risiko investasi atau kredit (Porwal, 2001). Kualitas laporan keuangan sebagai sumber informasi keuangan perusahaan sering kali dimanipulasi sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi keuangan perusahaan. Sebagai contoh kasus yang telah terjadi ada pada kasus PT Kimia Farma, Badan Pengawas Pasar (Bapepam) yang saat ini telah digantikan perannya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan pemeriksaan atas penyelidikan baik terhadap manajemen lama direksi PT Kimia Farma Tbk ataupun akuntan publik Hans Tuamakotta dan Mustafa (HTM). Kedua akuntan publik harus bertanggung jawab karena melakukan audit pada PT Kimia Farma Tbk pada tahun buku 31 Desember 2001 dan dengan yang interim pada 30 Juni 2002. PT Kimia Farma diketahui melakukan *mark up* laba bersih dalam laporan keuangannya di tahun 2001. Dalam laporan tersebut, disebutkan bahwa PT Kimia Farma meraup keuntungan sebesar Rp 132 miliar. Sementara pada kenyataannya hanya meraup keuntungan sebesar Rp 99 miliar (Sulistiyowati, 2010). Agar dapat menilai kualitas laba sebuah perusahaan dapat dilihat dari beberapa faktor dibawah ini.

Faktor pertama yang dapat dijadikan tolak ukur kualitas laba adalah *Good Corporate Governance (GCG)*. Perusahaan yang tidak memiliki

Good Corporate Governance lebih baik dihindari agar tidak dapat menimbulkan masalah dikemudian hari. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai saat ini hampir sebanyak 70% penutupan usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) diakibatkan oleh buruknya pelayanan dan tata kelola perusahaan atau *Good Corporate Governance* (GCG). OJK pun meminta agar BPR saling bersinergi dan bekerjasama untuk membereskan permasalahan mendasar tersebut. Sebagai informasi bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat perkembangan industri Bank Perkreditan Rakyat (BPR) pada April 2017 tumbuh positif dengan total aset mencapai Rp. 115,2 triliun atau meningkat 10,18% secara tahunan (Marshall, 2017).

Otoritas Jasa Keuangan menutup usaha Bank Perkreditan Rakyat dikarenakan buruknya pelayanan dan tak adanya *Good Corporate Governance* dalam kinerja Bank Perkreditan Rakyat. Naiknya pertumbuhan total aset yang dimiliki oleh Bank Perkreditan Rakyat pada tahun 2017 itu tidak menjadikan alasan OJK membiarkan BPR terus beroperasi. Wardayati menyatakan belum dimplementasikannya *good corporate governance* (GCG) pada perbankan syariah. Menurut hasil penelitian IRTI menunjukkan pelaksanaan GCG belum terlaksana dengan baik di perbankan syariah diberbagai negara (Wardayati, 2011). Dengan mengimplementasikan GCG, bank syariah akan mampu menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkesinambungan, mewujudkan perusahaan yang lahir dari budaya *governance* yang berdasar pada akhlak alkarimah sehingga memberikan kemaslahatan dan kemanfaatan serta menghindari

kemudharatan. Selain itu, implementasi GCG dalam tinjauan islam adalah sebagai salah satu manifestasi ibadah atau masalah yang berasaskan ketakwaan sehingga bisnis yang dilakukan oleh bank syariah memperoleh keberkahan. Dapat disimpulkan bahwa keberadaan *Good Corporate Governance* menjadi sebuah hal yang penting dalam keberlangsungan perusahaan. Dan dapat menjadi salah satu alasan bagi investor untuk mempertimbangkan keputusan berinvestasi di sebuah perusahaan.

Faktor kedua yang dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk melihat baik tidaknya kualitas laba sebuah perusahaan adalah ukuran perusahaan. Agustiyanti memaparkan dalam salah satu laman berita mengenai pentingnya ukuran sebuah perusahaan. Perbankan secara industri boleh jadi membukukan pertumbuhan laba yang tinggi mencapai 16,5 persen hingga akhir kuartal ketiga. Pertumbuhan laba tersebut dipicu oleh tingginya laba bank-bank besar, sedangkan laba bank-bank kecil justru terperosok atau turun. Penurunan laba pada kelompok bank kecil antara lain didorong oleh penurunan penyaluran kredit. Ekonom LPS Doddy Ariefianto menjelaskan, tertekannya kinerja bank kecil disebabkan oleh ketidakmampuan bank kelompok tersebut dalam menurunkan bunga dana. Terlebih, mayoritas dananya berasal dari deposito yang merupakan dana mahal (Agustiyanti, 2017).

Laba yang dihasilkan oleh bank besar jauh melebihi laba yang dihasilkan oleh bank dengan skala kecil. Dengan kata lain ukuran perusahaan jika dilihat dari berita diatas mempengaruhi jumlah laba yang

dihasilkan tiap-tiap perusahaan. Penurunan pendapatan yang terjadi pada perusahaan memunculkan spekulasi pada para investor untuk menahan modalnya, karena sudah terlihat tidak menarik.

Faktor ketiga yang dapat dijadikan tolak ukur kualitas laba tiap perusahaan adalah struktur modal. Primadhyta dalam CNN Indonesia menjelaskan tentang pengaruh struktur modal terhadap kualitas laba pada Bank MNC International. PT Bank MNC International Tbk membukukan kerugian sebesar Rp51,43 miliar pada Juni 2017. Padahal, pada periode yang sama tahun lalu, bank milik konglomerat Hary Tanoesoedibjo tersebut masih tercatat mencetak laba bersih Rp6,63 miliar. Berdasarkan laporan keuangan perseroan, tergerusnya laba perseroan diakibatkan oleh membengkaknya beban operasional selain bunga yang sebesar 54,92 persen, yaitu dari Rp229,74 miliar pada semester I 2016 menjadi Rp355,91 miliar. Ke depan, Direktur Utama MNC Bank Benny Purnomo menyatakan, akan memperkuat struktur permodalan demi mendukung ekspansi kredit. Akhir tahun ini, modal inti perusahaan ditargetkan naik menjadi Rp2 triliun. Selain memperkuat struktur permodalan, lanjut Benny, perusahaan juga memiliki rencana strategis pada paruh kedua tahun ini untuk menggenjot kinerja perseroan, antara lain peningkatan penyaluran pinjaman pada segmen konsumen, ritel, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuk secara selektif dan hati-hati tetap mengembangkan segmen korporasi dan komersial (Primadhyta, 2017).

Dapat dilihat bahwa struktur modal merupakan cara yang efisien untuk meningkatkan laba sekaligus menarik minat para investor untuk menanamkan modalnya di perusahaan tersebut. Meskipun banyak lagi faktor yang dapat dipertimbangkan oleh seorang investor untuk melakukan investasi dan mengetahui kualitas laba tiap perusahaan, namun faktor terakhir yang akan peneliti sebutkan dibawah ini juga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan sebelum berinvestasi, faktor tersebut ialah kinerja keuangan. Fakta tentang pentingnya kinerja keuangan dalam mempengaruhi kualitas laba dapat dilihat disalah satu laman berita online, yakni Neraca.com. Supriyanto menjelaskan sebagai berikut, perkembangan perbankan syariah saat ini memang masih jauh dari harapan. Pasar yang besar, jika melihat penduduk muslim yang merupakan terbesar di dunia, tak menjamin laju perkembangan perbankan syariah cepat. Bahkan, kinerja keuangan bank syariah tak sebaik bank konvensional. Menurut catatan Biro Riset Infobank (birI), kinerja perbankan syariah tak kunjung membaik sejak 2012. Kejatuhan harga komoditas dan mineral juga menyebabkan perbankan syariah harus bergelut dengan pembiayaan bermasalah. Ada kelemahan yang memicu perbankan syariah Indonesia lambat berkembang. Perbankan syariah saat ini hanya memfokuskan pada fungsi sebagai bank komersial biasa, tidak memaksimalkan fungsi sebagai bank investasi (Supriyanto, 2018). Dapat disimpulkan bahwa belum baiknya kinerja keuangan Bank Syariah sejak tahun 2012. Fokus gerak bank syariah belum dimaksimalkan dengan baik sebagai bank investasi. Dan produk yang ada belum variatif sehingga para

investor belum begitu tertarik menanamkan modalnya di Bank Syariah. Berbanding terbalik dengan jumlah penduduk muslim di Indonesia yang masih memilih berinvestasi di bank konvensional.

Penelitian empiris mengenai kualitas laba telah banyak dilakukan. Salah satu faktor yang sering diuji pengaruhnya terhadap kualitas laba adalah *Good Corporate Governance*. Sihar Tambun, Riris Rotua Sitorus, Ingrid Panjaitan dan Ayu Zati Hardiah, mereka menemukan bahwa *good corporate governance* merupakan faktor yang sangat menentukan kualitas laba suatu perusahaan (Sihar Tambun, 2017). Ada juga bukti bahwa struktur dan praktik tata kelola perusahaan penting untuk mendukung kualitas laba yang dilaporkan, khususnya dengan mengurangi perilaku oportunistik manajemen laba (mis., Dechow, Sloan, dan Sweeney, 1996). Karena akuntansi keuangan secara bersamaan merupakan input dan output dari tata kelola perusahaan, kualitas pendapatan yang lebih tinggi dapat mengarah pada mekanisme tata kelola yang lebih efektif, dan mekanisme yang lebih efektif dapat berkontribusi pada kualitas pendapatan yang lebih tinggi. Argumen ini menyarankan saling melengkapi antara tata kelola perusahaan dan kualitas pendapatan (Sale, 2005).

Ali Arabborzoo, Saeedah Rashidpuran dan Alireza Arabi yang berjudul *the impact of corporate governance on earnings quality* menemukan fakta yang berbeda. Ali dan kawan-kawan menilai *good corporate governance* dengan 3 faktor yakni, *outside boards member*, *board independence* dan *ownership concentration* memberikan hasil bahwa *good corporate*

governance dinilai tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laba pada perusahaan yang ada di *Tehran Stock Exchange* yang tercatat di tahun 2007-2011 (Ali Arabborzoo, 2015). Hasil ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Cristina Gaio dan Clara C.Raposo yang berjudul *Corporate Governance and Earnings Quality: International evidence*. Cristina dan Clara memeriksa hubungan antara tata kelola perusahaan dan kualitas laba untuk sampel besar perusahaan di seluruh dunia. Tata kelola perusahaan adalah sistem kompleks dari mekanisme internal dan eksternal yang saling terkait, dan kualitas laba tidak mudah diukur. Oleh karena itu, mereka menggunakan dua peringkat tata kelola perusahaan yang dikenal luas (Peringkat Transparansi dan Pengungkapan S&P dan ISS *Corporate Governance Quotient*), untuk mengukur tata kelola perusahaan secara keseluruhan, dan menyusun peringkat agregat berdasarkan berbagai atribut pendapatan untuk mengukur kualitas laba secara keseluruhan. Cristina dan Clara menemukan hubungan negatif dan signifikan secara statistik antara peringkat tata kelola perusahaan dan peringkat kualitas laba, menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan dan kualitas pendapatan adalah mekanisme pengganti. Pembeneran untuk hasil ini adalah kebutuhan yang lebih rendah untuk berinvestasi dalam mekanisme tata kelola yang mahal untuk perusahaan-perusahaan yang sudah menawarkan kualitas pendapatan tingkat tinggi (C.Raposo, 2014).

Dari jabaran beberapa peneliti diatas, menunjukkan bahwa hasil-hasil penelitian tentang penerapan *good corporate governance* terhadap kualitas

laba tidak konsisten, sehingga perlu dilakukan pengujian kembali atas penelitian-penelitian sebelumnya. Maka, adanya penelitian ini untuk menyempurnakan penelitian-penelitian sebelumnya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan peneliti, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas laba, yaitu *good corporate governance*, ukuran perusahaan, struktur modal dan kinerja keuangan. Agar penelitian ini lebih terfokus dan tidak menimbulkan perluasan kajian, maka perlu diberlakukan pembatasan masalah. Penelitian ini dibatasi oleh dua faktor yang diduga mempengaruhi kualitas laba, yaitu *good corporate governance* dan ukuran perusahaan. Peneliti memiliki ketertarikan untuk meneliti dengan judul “Pengaruh *Good Corporate Governance* dan Ukuran Perusahaan terhadap Kualitas Laba pada Perbankan tahun 2018”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini ialah sebagai berikut.

1. Apakah terdapat pengaruh *Good Corporate Governance* dengan kualitas laba perbankan?
2. Apakah terdapat pengaruh ukuran perusahaan dengan kualitas laba perbankan?
3. Apakah terdapat pengaruh *Good Corporate Governance* dan ukuran perusahaan dengan kualitas laba perbankan?

C. Kegunaan Penelitian

Penelitian mengenai pengaruh *good corporate governance* dan ukuran perusahaan terhadap kualitas laba ini diharapkan dapat berguna secara teoritis maupun secara praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan tambahan dalam berfikir secara ilmiah serta memberikan referensi tambahan dibidang akuntansi dalam lingkup sempitnya dan pada bidang ekonomi secara luasnya. Terkhusus kaitannya dengan pembahasan *Good Corporate Governance* dan Ukuran Perusahaan sebuah perusahaan.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai pemecahan masalah berbagai pihak, antara lain:

a) Bagi peneliti

Penelitian ini bermanfaat dalam menambah pengetahuan dan memberikan gambaran mengenai seberapa berpengaruhnya *Good Corporate Governance* dan Ukuran Perusahaan terhadap penilaian calon investor sebelum terjun ke dunia profesional kerja yang sesungguhnya.

b) Bagi pihak Universitas

Hasil penelitian ini sebagai sumbangan koleksi, bahan referensi dan bacaan bagi mahasiswa pendidikan khususnya dan mahasiswa Universitas Negeri Jakarta pada umumnya serta dapat menambah pengetahuan dan informasi baru bagi civitas akademika yang memiliki minat untuk meneliti masalah ini.

c) Bagi Emiten

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan untuk melakukan pengukuran terhadap *Good Corporate Governance* atas investasi yang dipilih dan ukuran perusahaan di dalam suatu perusahaan, khususnya yang berguna dibidang manajemen dan perbankan dalam mengukur tingkat kualitas laba pada suatu perusahaan dan memprediksi investasi dimasa yang akan datang.

d) Bagi Calon Investor

Dapat mempergunakan hasil penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan investasi.

e) Bagi Mahasiswa

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan, pengetahuan dan bermanfaat sebagai tambahan informasi untuk bahan referensi jika ingin mengadakan penelitian yang serupa.